

KEJUTAN BAGI 160 JUTA PETANI

Harga Pupuk Bersubsidi Turun 20 Persen

Kabar gembira sekaligus kejutan bagi sekitar 160 juta petani di Indonesia, sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Atas perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengumumkan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen pada Rabu (22/10/2025). Amran mengatakan langkah besar ini sebagai bagian dari revitalisasi sektor pupuk nasional. Langkah ini juga sebagai milestone, tonggak sejarah, karena sebelumnya tiap tahun atau tiap dua tahun terjadi kenaikan harga pupuk, namun sekarang terjadi penurunan harga karena hasil efisiensi yang merupakan gagasan besar Presiden Prabowo. Dengan pemanfaatan hasil efisiensi ini, maka penurunan harga pupuk tidak membebani APBN. Penurunan harga ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi, termasuk pupuk Urea, NPK hingga pupuk organik yang menjadi kebutuhan utama petani. Langkah menurunkan harga pupuk ini menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani karena petani bisa menikmati harga pupuk yang lebih terjangkau. Dampaknya adalah bisa meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun demikian, penurunan harga pupuk subsidi ini tak serta merta menurunkan harga beras.

BACA HAL 11...

PUPUK UREA:
dari Rp2.250 per kilogram
menjadi Rp1.800 per kilogram
(Rp90.000 per sak 50 kg)

NPK:
dari Rp2.300 per kilogram
menjadi Rp1.840 per kilogram
(Rp92.000 per sak 50 kg)

NPK KAKAO:
dari Rp3.300 per kilogram
menjadi Rp2.640 per kilogram
(Rp132.000 per sak 50 kg)

ZA KHUSUS TEBU:
dari Rp1.700 per kilogram
menjadi Rp1.360 per kilogram
(Rp68.000 per sak 50 kg)

PUPUK ORGANIK:
dari Rp800 per kilogram
menjadi Rp640 per kilogram
(Rp25.600 per sak 40 kg).

**HARGA BARU
PUPUK
BERSUBSIDI**

*Petani sedang
menabur pupuk di
ladang padi
miliknya. (ist)*



DITJEN PESANTREN, KADO PRESIDEN PRABOWO DI HARI SANTRI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan setidaknya terdapat 300 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih mengalami kerugian dengan total mencapai Rp5,5 triliun. Ratusan BUMD yang merugi itu merupakan sekitar 28% dari total BUMD yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Daerah (Pemda) Indonesia yang sebanyak 1.091 unit.

Seiring dengan Hari Santri Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Hadirnya Ditjen Pesantren yang ditetapkan Selasa (21/10/2025) ini bak kado istimewa Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2025.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bersyukur atas kabar ini. Ia mengapresiasi para pihak yang telah mengawal terbitnya izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren, khususnya Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i.

"Wabil khusus Wamenag telah memperjuangkannya sesegera mungkin," kata Menag Nasaruddin Umar usai memimpin Apel Hari Santri 2025 di halaman Kantor Kementerian Agama, di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Usul pembentukan Ditjen Pesantren sudah berlangsung sejak 2019 pada masa Menag Lukman Hakim Saifuddin. Usulan Kemenag ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali diajukan pada 2021 dan tahun 2023 pada era Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Terakhir, usulan itu kembali diajukan ke Kementerian PANRB pada 2024 pada era Menag Nasaruddin Umar.

Lebih lanjut, Menag Nasaruddin Umar menyatakan kehadiran Ditjen Pesantren bertujuan untuk memperkuat konsolidasi dan koordinasi pondok pesantren secara nasional, apalagi selama ini masih terdapat pesantren yang belum terdapat atau belum tersentuh bantuan pemerintah.

"Dengan adanya Ditjen, hal-hal tersebut bisa tertangani dengan lebih baik karena ada perangkat kerja yang lebih luas dan sistem yang lebih terkoordinasi," ujar Menag.

Ia mengatakan keberadaan Ditjen Pesantren juga akan memudahkan pemerintah dalam memastikan

seluruh pesantren dapat menjalankan peran strategisnya di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

"Dengan Ditjen ini, kita bisa memantau seluruh pesantren dalam arti positif. Pemerintah ingin memastikan semua pesantren benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal," kata dia.

Menag menilai Ditjen Pesantren juga akan memperkuat kontribusi Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan umat serta membentuk generasi santri yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia.

Ke depan, sistem pendataan dan sertifikasi pesantren akan diintensifkan untuk memastikan data yang lebih valid dan pelaksanaan program yang lebih tertib. "Selama ini sertifikasi sudah berjalan, tetapi ke depan akan lebih diperkuat agar data pesantren semakin valid dan program-program pembinaannya lebih tepat sasaran," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut Wamenag Romo Muhammad Syafi'i menyampaikan lebih detil terkait terbitnya izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren.

"Alhamdulillah, saya baru saja menerima kabar dari Kementerian Sekretariat Negara tentang terbitnya Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama," kata Wamenag Romo Syafi'i.

Melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memerintahkan agar segera dibentuk Ditjen Pesantren di lingkungan Kemenag.

"Dengan surat ini, saya ingin menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren. Pembentukan ini bertujuan agar perhatian terhadap pesantren



Peringatan Hari Santri 2025. (Dok. kemenag)

semakin besar, baik dari sisi personalia, pendanaan, maupun program, sehingga pemerintah semakin hadir dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia," kata dia.

"Semoga dengan adanya Ditjen ini, pesantren ke depan dapat semakin berdaya dan berkontribusi besar bagi bangsa," kata Wamenag Romo Syafi'i.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, jajaran Kabinet Merah Putih, serta seluruh insan Kemenag yang sejak 2019 konsisten memperjuangkan lahirnya Ditjen Pesantren.

Staf Khusus Menteri Agama Nona Gayatri Nasution mengatakan pembentukan Ditjen Pesantren telah memenuhi tiga kriteria penataan organisasi yang efektif: tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukur. Dari sisi fungsi, Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2019 menegaskan tiga peran utama pesantren-pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat-fungsi yang sesungguhnya telah dijalankan pesantren sejak abad ke-15 dan menjadi ruh peradaban Islam Nusantara.

Fungsi pendidikan pesantren terus berkembang dari tingkat dasar hingga ma'had aly (setara perguruan tinggi), menjadi pusat pembelajaran Islam rahmatan lil 'alamin yang melahirkan generasi berilmu dan berakhlak mulia.

Fungsi dakwah pesantren membangun kehidupan sosial yang moderat dan harmonis, menanamkan nilai tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), i'tidal (adil), dan tasamuh (toleran) sebagai karakter khas Islam Indonesia. Sementara fungsi pemberdayaan masyarakat menjadikan pesantren sebagai pusat ekonomi umat, berperan nyata dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan kemandirian di tingkat lokal.

Secara historis, pesantren mulai diakui dalam Sistem Pendidikan Nasional setelah terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Beberapa tahun kemudian, dibentuk Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di bawah Ditjen Pendidikan Islam. Pada 2024, satuan kerja tersebut berubah menjadi Direktorat Pesantren.

"Dan kini-sejalan dengan izin prakarsa Presiden-sedang disiapkan peningkatan statusnya menjadi Direktorat Jenderal Pesantren," kata Nona dalam tulisannya, di situs Kemenag, Rabu (22/10/2025).

Dengan disetujuinya izin prakarsa ini, Nona menjelaskan pemerintah membuka jalan bagi lahirnya Ditjen Pesantren sebagai lembaga yang akan memperkuat tiga fungsi utama tersebut secara lebih sistematis, inklusif, dan berkelanjutan. (han,ant,ist/lut)



Dengan Ditjen ini, kita bisa memantau seluruh pesantren dalam arti positif. Pemerintah ingin memastikan semua pesantren benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal,"

**NASARUDDIN
UMAR**
Menteri Agama

BUNTUT PENGGUNAAN JET PRIBADI, KOMISI II DPR RI AKAN PANGGIL KPU

Menyusul pemberian sanksi peringatan keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP terhadap komisioner KPU terkait penggunaan jet pribadi di luar kepentingan tugas dalam proses pemilu 2024 lalu, Komisi II DPR RI akan memanggil komisioner KPU.

“**S**aat ini masih masa reses, setelah masuk (masa) sidang, akan kami panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, Rabu (22/10/2025).

Tak hanya meminta penjelasan mengenai sanksi dari DKPP, para legislator juga akan mengonfirmasi soal penggunaan jet pribadi yang membuat para komisioner KPU dikenai hukuman peringatan keras. Sebab, setiap rupiah anggaran negara harus dipertanggungjawabkan dan penyelenggara pemilu mesti menjaga kepatutan serta etika yang berlaku. Oleh karena itu pihaknya berharap agar setiap anggaran negara digunakan dengan sangat hati-hati.

“Semua fasilitas yang disediakan negara tentu diperuntukan melancarkan tugas negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara atau pejabat public. Bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Sementara, anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengatakan penggunaan private jet untuk kunjungan komisioner akan menjadi catatan penting bagi alokasi anggaran pemilu berikutnya. “Selain itu, juga akan menjadi catatan penting bagi kami dalam proses persetujuan program dan tahapan penyelenggaraan pemilu berikutnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada dirinya dan empat komisioner KPU.

Sanksi itu dijatuhkan lantaran penggunaan jet pribadi saat perjalanan dinas. Afif memastikan akan mematuhi peringatan keras tersebut. “Kita hormati putusan DKPP,” ujarnya dilansir Kompas, Rabu (22/10/2025).

Dia juga mengatakan, putusan ini akan menjadi pembelajaran untuk lembaga KPU RI agar peristiwa serupa tidak terjadi di masa depan.

“Menjadi pembelajaran untuk ke



Wakil Ketua Komisi II
DPR RI, Dede Yusuf
Macan Effendi.
(Parlementaria)

depannya,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, DKPP mengungkapkan dalam sidang yang digelar pada Selasa (21/10/2025), bahwa ketua dan empat Anggota KPU RI melakukan 59 kali perjalanan menggunakan jet pribadi sewaan saat Pemilu 2024. Namun tidak satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik sebagaimana yang pernah diakui kelima pimpinan KPU tersebut, yakni Afifuddin, Idham Holik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.

DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan empat komisioner KPU RI lainnya. Mereka yakni Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Selain mereka, sanksi juga dijatuhkan kepada Sekjen KPU RI, Bernard Darmawan. Mereka terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

DKPP merehabilitasi nama baik anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, yang dinyatakan tidak terbukti melanggar etik.

Anggota Majelis DKPP Ratna Dewi mengatakan tindakan teradu I sampai dengan teradu V dan teradu VII dalam penggunaan private jet tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Terlebih, teradu I sampai dengan teradu V dan teradu VII memilih private jet dengan jenis yang eksklusif dan mewah.

Dalam sidang itu juga mengungkap bahwa kelima anggota KPU itu melakukan 59 kali perjalanan dinas dengan

menggunakan jet pribadi. “Bahwa penggunaan private jet tidak sesuai dengan perencanaan awal untuk monitoring distribusi logistik di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Bahwa di antara 59 kali perjalanan menggunakan private jet tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik,” kata Ratna.

Padahal, lanjut Ratna, kelima anggota KPU beralasan bahwa penggunaan jet pribadi ditujukan untuk monitoring logistik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun faktanya, daerah-daerah yang dituju bukan daerah 3T dan memiliki penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang memadai.

Salah satu perjalanan yang diungkap dalam sidang tersebut, jet pribadi pernah digunakan untuk pergi ke Bali dengan agenda monitoring logistik, sortir, dan lipat suara.

Selain ke Bali, jet pribadi juga digunakan untuk ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengecek masalah perhitungan suara di luar negeri yang terjadi.

Selama 59 kali perjalanan dinas menggunakan jet pribadi, jumlah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan kelima anggota KPU itu sebesar Rp 90 miliar. Kelimanya bahkan terungkap menggunakan jet pribadi mewah dengan jenis Embraer Legacy 650.

Atas dasar fakta persidangan tersebut, DKPP kemudian menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan empat anggota KPU RI.

“

Semua fasilitas yang disediakan negara tentu diperuntukan melancarkan tugas negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara atau pejabat public. Bukan untuk kepentingan pribadi,”

**DEDE YUSUF
MACAN EFFENDI**

Wakil Ketua Komisi II
DPR RI

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras pada teradu 1 Mochammad Afifuddin selaku ketua merangkap anggota, teradu 2 Idham Holik, teradu 3 Yulianto Sudrajat, teradu 4 Parsadaan Harahap, dan teradu 5 August Mellaz, masing-masing selaku anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ketua DKPP Heddy Lugito.

Sementara itu, sanksi yang diberikan pada komisioner KPU RI oleh DKPP dinilai tidak layak. “Sanksi peringatan sangat tidak layak untuk kasus sebesar ini,” kata Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, dilansir tribunnews Rabu (22/3/2025).

Perludem menilai perbuatan anggota KPU itu merupakan bentuk menghambur-hamburkan anggaran. Serta bentuk kemewahan pejabat negara yang dibungkus dengan alasan tidak masuk akal.

Terlebih lagi, lanjut Haykal, uang yang digunakan untuk menyewa jet pribadi tersebut bersumber dari pajak masyarakat.

“Semakin menegaskan pentingnya untuk melakukan penataan ulang kelembagaan penyelenggara pemilu kita. Mulai dari proses rekrutmen hingga penegakan kode etik,” pungkas Haykal. (han,rls,ist/lut)

HAPUS TUNGGAKAN BPJS KESEHATAN, PEMERINTAH SIAPKAN RP20 T

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan besar untuk meringankan beban jutaan peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran selama bertahun-tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp20 triliun untuk mendukung penghapusan sebagian tunggakan tersebut, sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah reformasi sistem jaminan sosial yang berkeadilan, agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena terbebani utang lama.

“Tadi diminta dianggarkan sekitar Rp20 triliun. Jadi sesuai janji Presiden, itu sudah kami siapkan,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (22/10/2025), usai menghadiri rapat bersama jajaran BPJS Kesehatan.

Purbaya menjelaskan, dana yang disiapkan bukan untuk menutup seluruh tunggakan peserta, melainkan sebagai cadangan fiskal untuk mendukung penyesuaian sistem kepesertaan dan validasi data. Pemerintah ingin memastikan peserta yang benar-benar tidak mampu, seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI), tetap terlindungi dan tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan.

Menurut data BPJS Kesehatan, total tunggakan peserta mandiri mencapai lebih dari Rp10 triliun, berasal dari sekitar 11 juta peserta yang sudah tidak aktif dalam beberapa tahun terakhir. Dari jumlah itu, sekitar 60% merupakan peserta kelas III mandiri, yang sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Tak Beban APBN

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa kebijakan penghapusan tunggakan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. Ia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk penghapusbukuan administratif (write-off) terhadap piutang lama yang sudah tidak tertagih, bukan penghapusan utang menggunakan uang negara.

“Enggak pakai APBN. Ini hanya pembenahan data. Uang itu tidak kita hitung lagi karena sudah tidak mungkin tertagih dan tidak mengganggu keuangan negara,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan.

Ghufron menjelaskan, kebijakan ini bersifat terbatas dengan skema maksimal penghapusan dua tahun tunggakan terakhir (24 bulan). Jika peserta memiliki tunggakan lebih dari dua tahun, maka sisanya tetap harus



dibayar sebelum status kepesertaan kembali aktif.

“Misalnya ada peserta yang menunggak sejak 2016, maka yang bisa dihapus hanya dua tahun pertama. Setelah itu, ia bisa kembali aktif jika membayar iuran bulan

berjalan,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan mampu membersihkan data kepesertaan BPJS Kesehatan yang selama ini tidak akurat akibat banyaknya peserta menunggak dan tidak pernah memperbarui statusnya. Setelah data diperbarui,

Purbaya Pastikan Iuran Tahun 2026 Tak Naik

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah belum berencana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2026.

Menurutnya, saat ini pemerintah masih akan berfokus memulihkan perekonomian di dalam negeri terlebih dahulu.

“Ini kan ekonominya baru mau pulih. Belum lari. Kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih,” ujar Purbaya kepada awak media di Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Kendati begitu, Purbaya akan membuka peluang untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan jika ekonomi Indonesia tahun 2026 bisa tumbuh di atas 6%.

“Dalam pengertian tumbuhnya ada 6% lebih. Dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikirkan menaikkan beban masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026.

Dalam dokumen tersebut, disebutkan penyesuaian iuran menjadi salah satu upaya menjaga keseimbangan kewajiban skema pembiayaan antara masyarakat sebagai peserta, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun kenaikan iuran dapat dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menekankan pentingnya dalam pelaksanaan pemutihan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya, pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini harus benar-benar ditujukan untuk menanggungan beban bagi kelompok yang benar-benar tidak mampu.

“Pemutihan boleh dilakukan untuk yang memang tidak mampu, tetapi data peserta yang mendapat keringanan harus diverifikasi dengan baik dan terbuka. Pemerintah harus memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan atau fraud dalam

peserta yang memenuhi syarat dapat langsung aktif kembali tanpa harus melunasi utang lama.

Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan saat ini sedang melakukan verifikasi dan sinkronisasi data peserta, terutama untuk membedakan peserta mandiri yang kini sudah masuk kategori PBI Pemerintah Daerah.

Kebijakan pemutihan tunggakan ini juga mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menargetkan implementasinya dapat dimulai sebelum akhir November 2025. Ia menilai langkah ini penting untuk memperkuat fondasi Universal Health Coverage (UHC) dan memperluas akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. (wid,rls,ant/dya)

SKEMA DAN BESARAN IURAN PESERTA BPJS KESEHATAN

A. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Peserta PBI iurannya dibayar penuh oleh pemerintah. Termasuk masyarakat tidak mampu yang telah terdata oleh Kementerian Sosial.

B. Pekerja Penerima Upah (PPU)

- Berlaku bagi pegawai pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan swasta.
- Besaran iuran: 5% dari gaji atau upah per bulan.
- 4% ditanggung pemberi kerja.
- 1% dibayar oleh pekerja.
- Tambahan Keluarga PPU:
 - Untuk anak ke-4 dan seterusnya, orang tua, atau mertua: → 1% dari gaji/upah per orang per bulan (dibayar oleh pekerja).

C. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPBU) dan Bukan Pekerja (BP)

- Tarif iuran per individu per bulan:

- Kelas I
Rp 150.000
- Kelas II
Rp 100.000
- Kelas III
Rp 42.000
- Dapat subsidi pemerintah

Catatan untuk Kelas III:

Sejak 1 Januari 2021, peserta membayar Rp 35.000 per bulan, sedangkan pemerintah menanggung Rp 7.000 sebagai bantuan iuran.

D. Veteran dan Perintis Kemerdekaan

Besaran iuran: 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun. Seluruhnya dibayar oleh pemerintah.



proses penghapusan tunggakan,” ujar Netty. Menurutnya, kebijakan ini perlu dilaksanakan dengan sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang disiplin membayar iuran BPJS Kesehatan. (wid,kcm,ant/dya)

KODE DARI ISTANA: MOBIL NASIONAL MASUK PSN

Pabrik Disiapkan di Jawa Tengah, Target Produksi 2028

Pemerintah memberi kode kuat bahwa program mobil nasional bakal segera masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini disebut sebagai tonggak baru dalam membangun kemandirian industri otomotif nasional yang selama ini bergantung pada pabrikan asing. Kalangan pengamat mengingatkan pemerintah harus berhati-hati agar proyek ini tidak mengulang kegagalan proyek Mobil Timor pada 1990-an.

Juru Bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, Presiden Prabowo ingin agar proyek ini tidak hanya menjadi simbol nasionalisme. Tetapi juga menghasilkan produk yang kompetitif, efisien, dan ramah lingkungan.

"Nanti kita lihat, rasa-rasanya masuk PSN," ujar Prasetyo, dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/10/2025).

"Sore ini kami memang menggelar rapat untuk membahas proyek mobil nasional, termasuk pembiayaan dan arah industrinya. Setelah keputusan final, akan kami sampaikan secara resmi," imbuhnya.

"Cita-cita kita jelas, bangsa Indonesia harus mampu memproduksi mobil sendiri, bukan hanya merakit," kata Prasetyo menegaskan.

Pemerintah menargetkan uji produksi pertama pada 2027 dan peluncuran resmi pada 2028, bertepatan dengan program Indonesia E-Mobility Roadmap yang dicanangkan Kementerian Perhubungan.

Jika terealisasi, proyek ini akan menjadi PSN pertama di sektor otomotif dan menandai babak baru kemandirian industri manufaktur nasional.

"Kami ingin mobil nasional menjadi kebanggaan bangsa sekaligus pendorong ekonomi hijau," tutup Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/10/2025) Prabowo menyampaikan bahwa proyek mobil nasional menjadi bagian dari strategi industrialisasi besar-besaran untuk memperkuat basis manufaktur Indonesia.

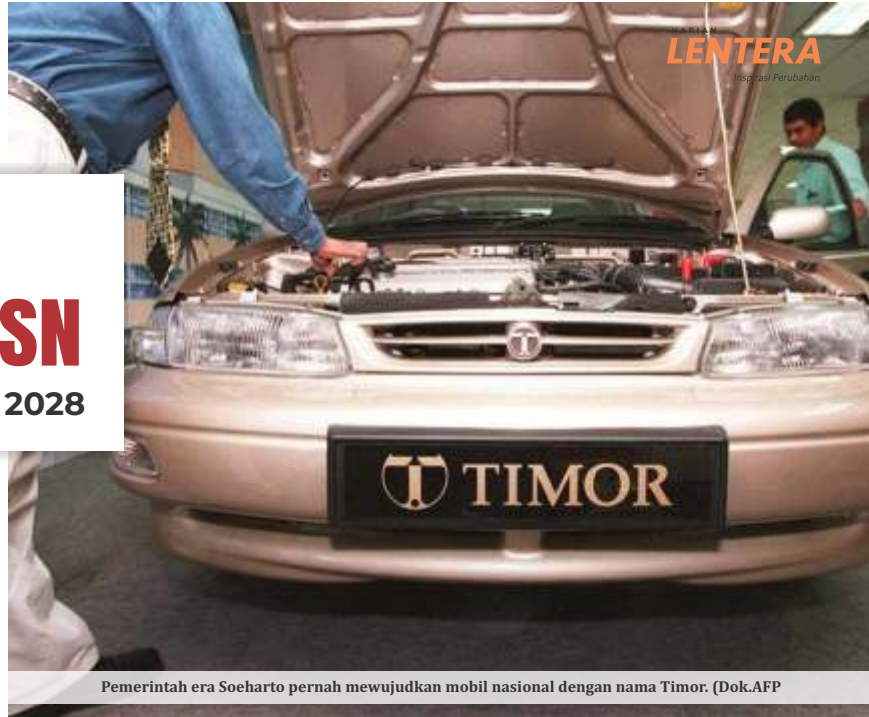
"Saudara-saudara, ini belum prestasi, tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang," tegas Prabowo.

Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana awal sebesar Rp7 triliun dan lahan sekitar

200 hektare di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, untuk pembangunan kompleks pabrik utama. Tim teknis lintas kementerian kini bekerja di bawah koordinasi Kementerian Perindustrian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Saya sudah mengalokasikan dana, lahan sudah siap, dan tim sudah bekerja. Kita tidak ingin gagal lagi seperti dulu," kata Prabowo dalam pernyataan tertulis yang dirilis Sekretariat Presiden.

Sumber di Kementerian



Pemerintah era Soeharto pernah mewujudkan mobil nasional dengan nama Timor. (Dok.AFP)

Perindustrian menyebut, proyek mobil nasional akan difokuskan pada kendaraan listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 60 persen di tahap awal.

Kementerian juga tengah menjajaki kerja sama dengan PT INKA (Persero) dan Danantara Automotive, perusahaan nasional yang tengah mengembangkan purwarupa mobil listrik berukuran kecil.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Taufik Aryadana, pada

Selasa (21/10/2025), menjelaskan bahwa konsep kendaraan nasional ini akan mengutamakan efisiensi dan keberlanjutan.

"Kita ingin mobil nasional berbasis energi hijau. Desain dan mesin dikembangkan di dalam negeri, sementara beberapa komponen teknologi tinggi seperti baterai akan dikembangkan bersama BRIN," ujar Taufik.(wid,rls,ant/dya)

PROYEK MOBIL NASIONAL PALING SIGNIFIKAN YANG PERNAH ADA DI INDONESIA

- Mobil Timor pada tahun 1996 di era Presiden Soeharto. Melalui penetapan mobil nasional ini, pemerintah memberikan berbagai fasilitas fiskal. Sayangnya, proyek ini harus terhenti tak lama setelah krisis moneter 1998 dan berujung pada gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
- Di era Presiden Joko Widodo, proyek mobil nasional juga sempat mendapatkan angin segar melalui merek Esemka. Mobil yang awalnya dirintis oleh siswa-siswa SMK di Solo ini kemudian berkembang menjadi pabrik perakitan yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 di Boyolali. Esemka sempat mengeluarkan model pertamanya berupa mobil niaga ringan Bima. Hingga kini, kehadirannya di pasar domestik masih belum masif.



Bebin juga menyoroti mengenai kesiapan waktu. "Apakah itu semua bisa siap dalam 3-5 tahun? Ketika tiba waktunya [siap dipasarkan], desain yang diminati sudah berubah, teknologi sudah lebih maju. Itulah tantangan yang harus dihadapi," tegasnya.(wid,bls,ist/dya)"Kuncinya adalah transparansi, efisiensi, dan keterlibatan pelaku industri nasional. Pemerintah juga harus mendorong riset otomotif di kampus dan SMK," ujar Arief Rabu (22/10/2025).

Belajar dari Gagalnya Mobil Timor dan Kesuksesan Negara Tetangga

PENGAMAT industri otomotif dari Universitas Indonesia, Arief Hidayat, menilai pemerintah harus berhati-hati agar proyek ini tidak mengulang kegagalan proyek Mobil Timor pada 1990-an. Saat itu, kebijakan proteksi dan ketergantungan pada satu pengusaha menyebabkan program tidak berkelanjutan.

"Kuncinya adalah transparansi, efisiensi, dan keterlibatan pelaku industri nasional. Pemerintah juga harus mendorong riset otomotif di kampus dan SMK," ujar Arief Rabu (22/10/2025).

Sebagai pembandingan, negara tetangga seperti Malaysia sukses meluncurkan Proton pada 1985 dan Perodua pada 1993, yang kini menguasai lebih dari 50 persen pasar domestik. Sementara Vietnam melalui VinFast berhasil menembus pasar global hanya dalam lima tahun sejak berdiri pada 2017, dengan dukungan pemerintah dan riset intensif.

"Kita bisa belajar dari VinFast. Mereka berani masuk pasar Eropa dan Amerika karena kualitas dan branding kuat. Indonesia punya potensi besar jika dikelola

profesional," tambah Arief.

Pengamat Otomotif, Bebin Djuanda, berpendapat bahwa kepemilikan mobil nasional lebih mengarah pada aspek kebanggaan sebuah bangsa ketimbang sebuah urgensi industri.

"Tidak ada urgensi sebuah negara memiliki mobil nasional, tapi sebuah kebanggaan. Jika saja sebuah bangsa memiliki kendaraan yang dibuat sendiri tentu sangat membanggakan," ujar Bebin, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, hal inilah yang tampaknya menjadi pendorong utama bagi Presiden-Presiden terdahulu hingga saat ini, terutama di negara yang sudah terbiasa dengan merek-merek global yang sudah matang.

Tantangan terbesar yang dihadapi industri baru ini, lanjut Bebin, adalah bagaimana mencapai standar dunia, mengadopsi teknologi terkini, dan memiliki desain mutakhir, serta yang paling krusial, harga yang bersaing.

"Untuk itu dibutuhkan pembimbing yang sudah mapan. Tidak bisa jalan sendiri," tegasnya.

DPRD Tegaskan Akses Jalan Tembus di Griya Shanta Wewenang Pemkot Malang

MALANG - Komisi C DPRD Kota Malang menyatakan akses jalan yang direncanakan menjadi jalan tembus di kawasan Perumahan Griya Shanta, Kecamatan Lowokwaru, telah menjadi kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Dewan menilai, langkah tersebut sejalan dengan kepentingan publik. Namun tetap meminta agar komunikasi dengan warga sekitar terus diperkuat.

"Lokasi itu telah diserahkan oleh pihak pengembang sebagai bagian dari Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemkot Malang melalui berita acara resmi. Artinya, secara de jure dan de facto, jalan itu sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, dikonfirmasi pada Rabu (22/10/2025).

Dito juga menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPK), Dinas Perizinan, serta Satpol PP, jalan di kawasan tersebut telah tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Dengan status tersebut, legislatif

menilai intervensi Pemkot dalam upaya membuka akses jalan tembus tidak menyalahi aturan. Sebab, fasilitas yang telah menjadi bagian dari PSU memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas.

"Intervensi pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum seperti ini tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terlebih jika tujuannya untuk mendukung kepentingan publik," katanya.

Dito menambahkan, dari sisi perencanaan tata ruang, jalan tersebut juga telah berstatus sebagai jalan umum. Sehingga, Pemkot memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan penataan, termasuk rencana pembongkaran tembok pembatas di kawasan tersebut.

Meski begitu, Dito menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang intensif dengan warga. Menurutnya, sebagian warga memang masih menyisakan keberatan terhadap rencana pembukaan jalan. Meskipun saat ini sudah mulai ada perkembangan positif setelah dilakukan dialog antara pihak pengembang, Pemkot, dan warga.

Lebih lanjut, Dito juga mengungkapkan, pada Juni 2025 lalu, Komisi C telah menerima audiensi dari perwakilan warga RW 12 Griya Shanta yang menolak rencana tersebut. Penolakan itu muncul karena warga merasa belum mendapatkan penjelasan resmi dari Pemkot dan pengembang mengenai status jalan maupun rencana teknis yang akan dilakukan.

Namun setelah dilakukan penelusuran dan koordinasi lintas instansi, Komisi C menerima laporan bahwa pengembang sudah mulai menjalin komunikasi dengan warga dan tokoh masyarakat setempat. Hasil dari pertemuan itu bahkan telah terdokumentasikan secara resmi.

"Kelihatannya sudah ada progres positif, dan sebagian warga yang awalnya menolak kini mulai memahami setelah ada penjelasan

terbuka," ucapnya.

DPRD pun mendorong agar upaya komunikasi tersebut terus dilakukan oleh Pemkot dan pengembang. Menurut Dito, proses sosialisasi yang terbuka menjadi kunci agar kebijakan publik berjalan tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. "Tinggal bagaimana komunikasi ini terus dijaga dan diperkuat," pungkasnya. (Santi/Dya)



Lokasi rencana pembangunan jalan tembus antara perumahan Griya Shanta dan Jalan Simpang Candi Panggung, Kota Malang. (dok. Dishub Kota Malang)

Pemkot Batu Geber Pemeriksaan Kesehatan di 24 Wilayah

Pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangkaian HUT ke-24 Kota Batu, Balai Dusun Gerdu Desa Tulungrejo, Rabu (22/10/2025). (Santi/Lentera)



BATU - Rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu, Dinas Kesehatan menggeber kegiatan pemeriksaan dan skrining di 24 desa/kelurahan. Program ini menghadirkan layanan kesehatan gratis yang mudah dijangkau langsung di lingkungan tempat tinggal mereka.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja, menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat agar hidup sehat sejak dini.

"Era sekarang ini bukan lagi era mengobati atau kuratif saja, tetapi harus dimulai dari promotif dan preventif. Kita harus terus mengedukasi masyarakat untuk hidup bersih dan terutama hidup sehat," ujar Adit, ditemui usai membuka skrining kesehatan gratis di Balai Dusun Gerdu Desa Tulungrejo, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab pribadi setiap warga. Namun, pemerintah hadir untuk membantu memfasilitasi dan memberikan edukasi agar

masyarakat memiliki kesadaran hidup sehat.

"Kalau masyarakat tidak menjaga kesehatannya, saat sakit tentu akan berdampak secara fisik dan ekonomi karena biaya pengobatan yang besar. Maka kami hadir lebih dini memberikan edukasi agar mereka bisa menjaga diri tetap sehat," jelasnya.

Adit menambahkan, kegiatan ini sekaligus mendukung visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan langsung di lingkungan warga.

"Makanya kami sengaja tidak melaksanakan di balai desa atau kelurahan, tetapi menyasar di balai RW, posyandu, bahkan rumah warga. Harapannya masyarakat sekitar mudah mengakses layanan kesehatan ini," katanya.

Dalam kegiatan ini, juga dilaksanakan sosialisasi penyakit hipertensi dan diabetes melitus (DM). Menurut Adit, kedua penyakit tersebut menempati urutan tertinggi kasus penyakit tidak menular di Kota Batu, serta merupakan faktor risiko terbesar

yang dapat memicu penyakit lain.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Penanganan Bencana Dinkes Kota Batu, Susana Indahwati, mengatakan kegiatan skrining ini telah berjalan sejak awal Oktober dan akan berakhir dalam waktu dekat.

"Insyaallah besok sudah hari terakhir. Kami berkeliling ke 24 desa dan kelurahan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan tentang penyakit tidak menular," jelasnya.

Susana menyebutkan, layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan indeks massa tubuh, tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat jika ditemukan risiko tertentu.

Dikatakannya, antusiasme warga terhadap kegiatan ini sangat tinggi. Banyak sekali masyarakat yang datang sejak pagi untuk memanfaatkan kegiatan tersebut.

"Antusiasmenya luar biasa. Harapannya kegiatan seperti ini bisa berkesinambungan dari tahun ke tahun, agar derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat," tuturnya. (Santi/Dya)



Pada (18/10/2025), 64 warga negara Korea Selatan yang diduga terlibat penipuan di Kamboja kembali ke Korea Selatan dengan pesawat carteran di bawah pengawasan lebih dari 190 petugas polisi Korea Selatan. (Foto: Reuters)

Polisi melaporkan bahwa seorang perempuan berusia sekitar 30 tahun ditemukan tewas dalam keadaan mencurigakan pada 7 Oktober di wilayah dekat perbatasan antara Vietnam dan Kamboja.

"Setelah dikurung di hotel dalam waktu yang lama," kata polisi itu, dikutip South China Morning Post, Rabu (22/10/2025).

Kasus tewasnya warga Korea Selatan di Kamboja kembali mencuat setelah insiden tragis yang menimpa Park Min Ho, seorang mahasiswa asal Korsel yang meninggal dunia pada Agustus lalu akibat penculikan dan penyiksaan oleh pelaku penipuan daring. Tragedi ini menyoroti kembali maraknya kejahatan online scam yang beroperasi di kawasan tersebut.

Jenazah Park Min Ho telah dipulangkan ke Korea Selatan pada Selasa kemarin, sementara otoritas terus melakukan upaya untuk mengevakuasi dan melindungi warga yang menjadi korban sindikat serupa. Pemerintah Korea Selatan juga menunjukkan kepeduliannya dengan langkah nyata memulangkan sejumlah warga dari Kamboja.

Pekan lalu, sebanyak 64 orang yang terlibat dalam jaringan online scam—baik sebagai korban maupun pelaku telah berhasil dipulangkan. Sebagian besar dari mereka kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut dan mengungkap jaringan kejahatan lintas negara ini.

Kematian Park Min Ho memicu keprihatinan luas di Korea Selatan, karena menunjukkan bahwa bahkan negara maju dengan tingkat pendidikan tinggi pun tidak luput dari jerat kejahatan penipuan daring. Pemerintah menanggapi hal ini dengan langkah tegas, termasuk melarang warganya bepergian ke Kamboja dan menutup iklan lowongan kerja daring di kawasan Asia Tenggara.

Meski puluhan korban telah berhasil dipulangkan, sejumlah pihak menilai upaya itu belum cukup. Aktivis

anti-perjudian Korea Selatan, Jo Ho Yeon yang pernah terlibat dalam operasi kasino ilegal di Asia Tenggara mengungkapkan bahwa kasus yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari masalah yang sebenarnya.

Jo memperkirakan jumlah warga Korea Selatan yang berhasil ditemukan oleh keluarganya hanya sekitar 20 hingga 30 persen dari total korban kejahatan penipuan daring di Kamboja, menunjukkan masih banyak korban yang belum terselamatkan atau terdeteksi.

"Hanya ada beberapa ratus warga Korsel yang dilaporkan hilang oleh

JUMLAH WARGA KORSEL KORBAN SCAM DI KAMBOJA BERTAMBAH

Jumlah warga Korea Selatan yang tewas di Kamboja kembali bertambah, dengan dugaan kuat bahwa kasus ini terkait aktivitas penipuan daring atau online scam yang marak terjadi di negara tersebut.

pihak berwenang, tapi ini hanya sebagian kecil mengingat polisi tak tahu jumlah pastinya," kata Jo.

Data dari Kementerian Kehakiman Korea Selatan mencatat bahwa sekitar 2.000 hingga 3.000 warganya telah bepergian ke Kamboja dalam tiga tahun terakhir dan hingga kini belum kembali.

Sementara itu, laporan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyebutkan bahwa antara Januari hingga Agustus 2024 telah terjadi sedikitnya 550 kasus penculikan yang diduga terkait dengan jaringan penipuan daring.

Selain itu, lembaga riset

independen Cyber Scam Monitor mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 200 pusat operasi penipuan online dan kasino di Kamboja, berdasarkan hasil wawancara dengan mantan pekerja, survei lapangan, serta laporan dari berbagai media. (South China Morning Post, ist/nei)

KASUS PENIPUAN DARING TERBESAR DI KAMBOJA

- **Prince Holding Group / Chen Zhi (alias Vincent) (2025)**
Nilai kerugian mencapai US\$15 miliar, dengan sebagian aset berupa Bitcoin disita.
- **Jaringan Penipuan Daring Berbasis Sihanoukville (2024–2025)**
Diperkirakan menimbulkan kerugian lebih dari US\$12,5 miliar per tahun.
- **Jaringan Penipuan ASEAN–Kamboja (2023–2025)**
Nilai kerugian tidak disebut pasti, namun mencapai ratusan juta dolar AS.
- **Kasus Park Min Ho (Warga Korsel) (2025)**
Nilai kerugian tidak disebutkan secara resmi.
- **Penipuan Digital Berbasis Kasino di Phnom Penh (2024)**
Menimbulkan kerugian sekitar US\$1 miliar, menurut perkiraan investigasi PBB.



terlibat dalam pasar abu-abu.

Untuk memulihkan reputasinya, Aat mendesak pemerintah Thailand untuk memposisikan negara tersebut sebagai pusat global untuk bisnis yang transparan dan etis sebuah "pusat bisnis bersih."

Ia mengusulkan agar Thailand menjadi tuan rumah konferensi dan seminar internasional di Bangkok, mengundang negara-negara ekonomi besar seperti China, AS, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris untuk mengembangkan gugus tugas gabungan yang mempromosikan kerja sama antipenipuan dan transparansi ekonomi. (UNODC, The Nation Thailand, ist/nei)

Thailand Rugi 1 Triliun Baht Akibat Penipuan Online

EKONOMI Thailand diprediksi merugi sekitar 1 triliun baht setiap tahun akibat aktivitas jaringan penipuan lintas negara, menurut Associate Professor Dr. Aat Pisanwanich, ahli ekonomi internasional dan kawasan ASEAN.

Mengutip penelitian dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), ia menjelaskan bahwa Thailand memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas penipuan yang berhubungan dengan kasino serta sindikat kriminal yang beroperasi di Kamboja.

Di Kamboja, nilai kegiatan penipuan diperkirakan mencapai 1 triliun baht per tahun, setara dengan sekitar 60% dari PDB negara tersebut. Sementara di Thailand, transaksi yang terhubung dengan jaringan pasar gelap ini ditaksir melampaui 1 triliun baht per tahun, atau sekitar 10% dari PDB nasional—uang yang tidak memberikan nilai ekonomi nyata dan justru menghambat pertumbuhan negara.

"Ini seperti mobil yang hanya

beroperasi 90% dari kapasitas penuhnya," jelas Aat. "Operasi penipuan menurunkan PDB riil Thailand sekitar 10%. Operasi ini juga mengikis kepercayaan internasional terhadap perekonomian kita dan memicu pengawasan keuangan yang lebih ketat dari mitra dagang seperti Singapura. Jika dibiarkan, jaringan ini akan merusak citra Thailand dan menghalangi investasi asing jangka panjang."

Aat menilai masalah penipuan lintas negara terlalu besar untuk diatasi Thailand sendiri dan mendorong kerja sama dengan negara besar seperti AS, Inggris, dan Korea Selatan dalam menindak aset kriminal serta membongkar jaringan penipuan. Ia menekankan pentingnya bagi Thailand untuk memperbaiki citra dan menunjukkan penolakan tegas terhadap kejahatan tersebut di mata dunia.

Namun, ia mengakui bahwa penerapan penegakan hukum ketat ala Korea akan sulit dilakukan karena adanya konflik kepentingan antara politisi dan kelompok bisnis yang

MANFAAT DAN RISIKO BERJALAN TANPA ALAS KAKI

Sebberapa sering Anda berjalan tanpa menggunakan alas kaki? Ternyata, kebiasaan sederhana ini memiliki sejumlah manfaat, meskipun masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Memang, menggunakan sepatu atau sandal terasa lebih nyaman dan aman, namun tidak ada salahnya mencoba pengalaman berbeda ini. Berikut penjelasan mengenai berbagai manfaat serta risiko yang dapat timbul dari kebiasaan berjalan tanpa alas khaki.

Manfaat

Berjalan kaki mungkin tampak sebagai aktivitas sederhana, namun tahukah Anda bahwa melakukannya tanpa alas kaki dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan yang tidak terduga?

Kebiasaan ini, dikenal dengan istilah barefoot walking atau grounding, kini semakin populer karena diyakini mampu membantu meningkatkan fungsi tubuh secara alami. Berikut penjelasan mengenai sejumlah manfaat yang bisa diperoleh dari berjalan tanpa alas khaki.

Meningkatkan Suasana Hati

Berjalan kaki tanpa alas dapat membantu mengurangi stres dan depresi. Kebiasaan ini memungkinkan tubuh untuk merasakan berbagai bentuk dan tekstur tanah maupun jalan yang diinjak, sehingga memberikan efek menenangkan dan meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Sensasi alami yang dirasakan kaki dapat membantu tubuh lebih rileks dan menumbuhkan rasa

terhubung dengan alam. Selain itu, aktivitas ini juga membuat tubuh lebih fokus pada keseimbangan dan pergerakan setiap langkah.

Proses tersebut membantu menurunkan kadar hormon kortisol, yaitu hormon yang berperan dalam respons stres. Dengan rutin melakukannya, berjalan tanpa alas kaki dapat menjadi cara sederhana namun efektif untuk menenangkan pikiran dan menjaga kesehatan mental.

Mengurangi Rasa Sakit

Berjalan tanpa alas kaki atau barefoot walking dapat membantu mengurangi rasa sakit secara alami. Kontak langsung antara kaki dan tanah menghasilkan efek grounding yang bersifat antiradang, membantu menetralkan radikal bebas yang menjadi pemicu nyeri serta ketegangan otot. Akibatnya, tubuh menjadi lebih rileks, sirkulasi darah meningkat, dan rasa sakit pun berangsur berkurang.

Selain itu, kebiasaan barefoot walking juga bermanfaat bagi penderita nyeri kronis. Dengan melakukannya secara rutin, efek grounding membantu meredakan gejala nyeri secara bertahap sekaligus meningkatkan keseimbangan tubuh dan kesehatan sistem saraf.

Cara sederhana ini dapat menjadi terapi alami yang mendukung proses penyembuhan tanpa efek samping obat-obatan.

Meningkatkan Sirkulasi Darah

Saat berjalan kaki, tubuh secara alami menggunakan otot tambahan di bagian kaki dan tungkai untuk membantu menjaga keseimbangan

serta mengirimkan sinyal ke otak. Aktivitas ini melatih koordinasi antara sistem saraf dan otot, sehingga meningkatkan kesadaran tubuh terhadap posisi dan pergerakan. Dengan kata lain, berjalan kaki tidak hanya melibatkan otot utama, tetapi juga otot-otot kecil yang berperan penting dalam stabilitas tubuh.

Penggunaan otot tambahan tersebut memiliki manfaat serupa dengan olahraga. Sirkulasi darah di area kaki meningkat, sehingga lebih banyak oksigen dan nutrisi yang dibawa ke jaringan tubuh. Peningkatan aliran darah ini mendukung pemulihan, memperkuat otot, serta menjaga kesehatan kaki dan tungkai secara keseluruhan.

Meningkatkan Postur dan Keseimbangan

Berjalan tanpa alas kaki dengan cara yang benar dapat membantu melatih dan memperkuat otot-otot kecil pada khaki.

Aktivitas ini membuat setiap bagian kaki bekerja lebih aktif untuk menopang tubuh, menjaga keseimbangan, dan menyesuaikan langkah sesuai permukaan yang diinjak. Selain memperkuat otot, kebiasaan ini juga membantu meningkatkan fleksibilitas serta koordinasi gerakan khaki.

Selain itu, otak akan belajar memperhatikan sinyal yang dikirim dari kaki ke sistem saraf, sehingga postur tubuh menjadi lebih baik dan keseimbangan semakin terjaga.

Dengan latihan yang dilakukan secara rutin, tubuh akan terbiasa bergerak lebih stabil dan efisien, baik saat berjalan, berlari, maupun menjalani aktivitas sehari-hari lainnya.

Mengurangi Risiko Penyakit Jantung

Dikutip dari Agape Family Health, berjalan tanpa alas kaki atau grounding dapat memberikan efek antiradang alami pada tubuh.

Ketika kaki bersentuhan langsung dengan tanah, terjadi proses penyeimbangan muatan listrik di dalam tubuh yang membantu menurunkan stres oksidatif. Proses ini membuat tubuh lebih tenang dan mendukung fungsi sistem imun secara optimal.

Risiko

Meskipun memiliki banyak manfaat, kebiasaan berjalan tanpa menggunakan alas kaki dapat menimbulkan efek samping.

Terdapat berbagai kondisi yang dapat menyebabkan cedera ketika seseorang berjalan bertelanjang kaki di luar ruangan. Oleh karena itu, kehati-hatian tetap perlu diperhatikan agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan.

Beberapa kekurangan barefoot walking yaitu sebagai berikut.

Bertelanjang kaki dapat meningkatkan risiko berbagai infeksi dan cedera. Kemungkinan masuknya bakteri, infeksi jamur, serta virus menjadi lebih tinggi karena kaki tidak terlindungi.

Selain itu, berjalan di permukaan yang kotor dapat menyebabkan munculnya kutil plantar dan infeksi virus. Permukaan yang lembap, seperti lantai kamar mandi atau tanah basah, juga menjadi tempat ideal bagi kutu air dan jamur untuk menempel pada kulit. (nei,ist/dya)

ZANGI, APLIKASI PESAN YANG DIPAKAI AMMAR ZONI

Artis Ammar Zoni diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, dengan memanfaatkan aplikasi Zangi. Aplikasi tersebut diduga menjadi sarana komunikasi dalam menjalankan aksinya. Melalui aplikasi tersebut, Ammar dan sejumlah pihak lain yang terlibat dikabarkan berkoordinasi untuk mengatur transaksi serta distribusi barang haram tersebut tanpa terdeteksi pihak berwenang.

Dugaan ini muncul setelah aparat melakukan penyelidikan mendalam dan menemukan adanya pola komunikasi mencurigakan yang mengindikasikan adanya aktivitas ilegal di balik dinding tahanan.

Kasus ini pun menambah daftar panjang artis yang tersangkut dalam penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi perhatian publik mengenai lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Saat ini, pihak

kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengungkap jaringan dan peran masing-masing pelaku dalam kasus tersebut. Lantas, apa sebenarnya aplikasi Zangi itu? Dikutip dari laman resminya pada Rabu (22/10/2025), Zangi merupakan aplikasi pesan instan yang

berbasis di Silicon Valley, Amerika Serikat. Platform ini mengklaim menyediakan solusi komunikasi pribadi yang aman dan berkualitas tinggi bagi semua penggunanya.

Seperti layanan pesan digital lainnya, Zangi menegaskan tidak menyimpan ataupun membagikan data pribadi maupun pesan pengguna kepada pihak mana pun, karena sistemnya tidak memiliki akses terhadap isi pesan tersebut.

Zangi juga menyatakan tidak mengumpulkan maupun mengakses data pengguna, sehingga meminimalkan potensi penyusupan, pemantauan, atau adanya "celah belakang" (backdoor) yang dapat mengarah pada kebocoran informasi pribadi.

Melalui teknologi peer-to-peer (P2P), setiap panggilan dan pesan di Zangi dilakukan tanpa server perantara, melainkan melalui koneksi langsung yang bersifat terdesentralisasi.

Berbeda dengan aplikasi lain, Zangi menerapkan sistem enkripsi berlapis setara standar militer untuk menjaga kerahasiaan dan keaslian setiap panggilan serta pesan, bahkan saat digunakan di jaringan yang lemah atau berisiko tinggi.

Menurut keterangan Zangi, pengguna dapat melakukan panggilan berkualitas tinggi hingga tujuh menit dengan bandwidth satu megabit dan fitur Low Data Usage Mode untuk menghemat data. Aplikasi ini menawarkan panggilan audio dan video HD yang jernih tanpa iklan dan biaya langganan.

Pada dasarnya, aplikasi Zangi ditujukan bagi pengguna yang membutuhkan layanan pesan dan panggilan cepat serta aman, bahkan

di jaringan lambat. Aplikasi ini dirancang dengan fokus pada keamanan, khususnya bagi jurnalis, aktivis, dan pengacara yang memerlukan komunikasi rahasia.

Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis oleh siapa pun tanpa pembelian dalam aplikasi. Zangi menggunakan koneksi internet pengguna—baik 4G, 3G, 2G, EDGE, maupun Wi-Fi—untuk mengirim pesan dan melakukan panggilan kepada keluarga atau teman.

Selama pengguna tidak melebihi batas kuota data yang ditetapkan operator, mereka tidak akan dikenakan biaya tambahan saat menggunakan Zangi. Platform ini juga menegaskan bahwa seluruh komunikasi pengguna, termasuk pesan dan panggilan, terlindungi secara aman.

Zangi menyebut menggunakan tiga lapisan enkripsi kuat, termasuk enkripsi ujung ke ujung (end-to-end encryption), untuk melindungi seluruh konten dan metadata pengguna. Privasi pengguna juga dijamin karena perusahaan tidak menjual data analitik maupun informasi penggunaan kepada pihak mana pun.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutus akses aplikasi dan situs Zangi karena belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Privat sesuai Peraturan Menteri Koinfo Nomor 5 Tahun 2020.

Hingga kini, Zangi yang dikelola oleh Secret Phone Inc. belum memenuhi kewajiban pendaftaran meski layanannya masih dapat diakses di Indonesia.

"Kepatuhan ini penting untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat pengguna layanan digital di Indonesia," ujar Sabar dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025). (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG:** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

'BAG DOOR WIDE OPEN', TREN TAS 2026 JADI SOROTAN

Setelah rangkaian pekan mode internasional 2026 resmi berakhir, sejumlah tren baru mulai bermunculan dan menarik perhatian para pencinta fesyen. Salah satu item yang paling banyak diperbincangkan tahun ini adalah tas dengan desain unik bertajuk "bag door wide open."

Selama ini, tas identik dengan fungsi keamanan dan kerapatan untuk melindungi barang bawaan. Namun, tren kali ini justru menantang konsep tersebut. "Bag door wide open" hadir dengan tampilan terbuka lebar, baik karena resleting yang sengaja dibiarkan tidak tertutup maupun karena penggunaan tali tunggal yang membuat bagian dalam tas terlihat dari luar. Beberapa brand luxury yang memperkenalkan model tas ini antara lain:

Chanel Bag

Chanel dikenal dengan koleksi aksesoris klasiknya—seperti tas legendaris 2.55 dan Classic Flap Bag yang telah menjadi simbol investasi jangka panjang dan bahkan kerap diwariskan dari generasi ke generasi.

Oleh karena itu, ketika Matthieu Blazy, direktur artistik baru Chanel, menampilkan koleksi debut Spring/Summer 2026 pada Senin malam di Paris Fashion Week, ekspektasi publik pun sangat tinggi. Perhatian tidak hanya tertuju pada rancangan busana, tetapi juga pada aksesoris yang selalu menjadi daya tarik utama rumah mode tersebut.

Menurut para pengamat industri fesyen, Blazy berhasil memenuhi harapan tersebut. Salah satu item yang paling mencuri perhatian dari peragaan busana Chanel musim semi/musim panas 2026 adalah tas model "Crumpled" 2.55. Dalam koleksi ini, Blazy menghadirkan versi baru dari tas ikonik tersebut dengan efek kusut (crushed effect) dan flap terbuka yang menampilkan bagian dalam kulitnya. Tas ini hadir dalam beberapa warna elegan, seperti hitam dan perak, yang menegaskan kesan klasik namun tetap modern.

Dior

Koleksi tas Dior untuk musim semi-musim panas 2026 menampilkan beragam desain, mulai dari tas Bow dengan siluet artistik, hingga hobo berbahan suede lembut dan clutch berstruktur tegas. Motif pita (bow) menjadi salah satu elemen utama yang mendominasi panggung peragaan, diterapkan dengan sentuhan anggun pada berbagai model tas dalam koleksi ini.

Tas kulit Bow Bag tampil menonjol dengan lipatan depan menyerupai amplop dan bagian flap yang terselip ke dalam sebagai penutup pada bagian atas yang terbuka. Pegangan melengkung yang melewati loop logam berwarna emas menjadi referensi halus terhadap ikon Lady Dior, sementara pita lembut di bagian

Fendi

Fendi menampilkan deretan tas Peekaboo bertali tunggal dengan sisi terbuka yang menampilkan bagian dalam tas. Sejak awal abad ke-21—tepatnya sejak penayangan episode Sex and the City musim ketiga berjudul "What Goes Around Comes

Around"—tas berkilau khas Fendi telah menjadi ikon bagi para pencinta gaya ekstrovert.

Pada peragaan busana Milan Fashion Week, gaya It bag khas Fendi tetap mempertahankan ciri khasnya. Koleksi terbarunya dipenuhi dengan tas Baguette berhiaskan bunga payet tiga dimensi dan anyaman sutra berkilau menyerupai kabel.

Namun, direktur kreatif Silvia Venturini Fendi juga menghadirkan sesuatu bagi perempuan yang menonjolkan kilau dari dalam—disebutnya sebagai "introvert bergaya." Musim ini, Fendi memadukan setelan polkadot semi-transparan serta gaun lipit tajam dengan versi terbaru Peekaboo—tas ikonik berbentuk trapesium yang kini benar-benar mencerminkan namanya (peek-a-boo berarti "intip").

Dari kejauhan, Peekaboo Spring 2026 tampak ideal bagi mereka yang menyukai gaya sederhana. Tas ini dibuat dari kulit bernuansa netral yang cocok untuk berbagai kesempatan, dengan kompartemen praktis berukuran pas untuk ponsel, dompet, kunci, hingga Kindle.

Namun, ketika sisi tas dibuka, muncul sentuhan mengejutkan berupa semburat payet merah muda dan biru, atau satin hijau chartreuse yang mencolok. Kontras antara bagian luar yang tenang dan bagian dalam yang penuh warna menjadi daya tarik utama dari koleksi Peekaboo terbaru Fendi.

Loewe

Di bawah arahan duet direktur kreatif baru, Jack McCollough dan Lazaro Hernandez, Loewe memperkenalkan tampilan perdana yang menandai arah baru bagi rumah mode tersebut melalui tas ikonik Amazona 180.

Terbuat dari bahan kulit dengan satu tali pegangan, tas ini ditampilkan secara kasual di gengaman tangan para model sengaja dibiarkan terbuka dan dimiringkan sekitar 45 derajat ke kanan, menonjolkan kesan bebas dan modern.

Dalam debut mereka di Loewe, McCollough dan Hernandez menghadirkan reinterpretasi terhadap desain klasik Amazona. Dengan

pendekatan estetika yang lebih santai, tas ini memiliki pegangan atas tunggal serta logo "L" ganda yang menjadi identitas baru merek tersebut. Diperagakan dengan resleting terbuka di atas panggung, tas berbahan kulit halus, suede, dan kulit bertekstur efek buaya ini menarik perhatian publik karena tampilannya yang elegan namun tetap kasual.

Louis Vuitton

Louis Vuitton turut menghadirkan tas model tote bag dengan satu tali pegangan yang dibawa para model dalam kondisi terbuka di panggung peragaan.

Melengkapi koleksi bucket bag musim ini, rumah mode tersebut juga menampilkan edisi eksotis dengan siluet lebih tegas dan sedikit berbentuk trapesium, mengingatkan pada desain ikonik Capucines.

Tas ini terbuat dari kulit buaya putih mengkilap—atau kemungkinan dari kulit timbul yang menyerupai tekstur buaya—dilengkapi dengan detail resleting unik di sepanjang sisi panel depan yang berfungsi untuk memperluas ruang bagian dalam ketika terisi penuh.

Pelat logam di bagian depan memberikan sentuhan elegan, sementara bagian dalamnya menampilkan kantong berbahan kanvas katun dengan tali serut yang diamankan menggunakan tali kulit dan hiasan tab Monogram.

Pegangan atas yang pendek dan terpilin menjadi pelengkap sempurna bagi desain yang memadukan kemewahan dan keanggunan ini. Setiap detailnya dirancang dengan presisi, menghadirkan keseimbangan antara fungsionalitas dan estetika tinggi.

Kombinasi material premium dan teknik pengerjaan yang halus menjadikan tas ini tidak hanya sebagai aksesoris mode, tetapi juga simbol gaya hidup modern yang berkelas. Dengan tampilan yang serbaguna,

tas ini cocok digunakan baik untuk acara formal maupun kasual, memberikan kesan mewah tanpa kehilangan sentuhan kepraktisannya. (nei,ist/dya)



Kejutannya Bagi 160 Juta ...dari hal 1

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengatakan penurunan harga pupuk ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

"Hari ini adalah milestone, tonggak sejarah. Revitalisasi sektor pupuk, sarana produksi. Ini sangat penting. Hari ini diumumkan atas arahan Bapak Presiden, atas perintah Bapak Presiden. 'Tolong, hari Rabu, diumumkan harga pupuk turun 20%'. Berlaku mulai hari ini. Ini adalah berita gembira," kata Amrandi Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Penurunan harga ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi, termasuk pupuk Urea dan NPK yang menjadi kebutuhan utama petani. Amran menjelaskan, harga pupuk Urea kini turun dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, atau setara dengan penurunan harga dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak. Sementara itu, harga pupuk NPK juga diturunkan dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak.

"Ini berita baik untuk petani seluruh Indonesia. 160 juta warga petani kita menanti berita ini. Karena yang terjadi sebelumnya, puluhan tahun adalah tiap tahun naik atau tiap dua tahun. Sekarang turun karena hasil efisiensi yang merupakan gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Ia menegaskan, dilansir cnbcindonesia, penurunan harga ini dilakukan tanpa menambah beban subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Inilah hasil dari efisiensi efektif produktif. Ini adalah hasil efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Ini tidak menambah anggaran APBN, tetapi menurunkan harga 20%," tutur dia.

Amran menegaskan, Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk sampai ke tangan petani dengan harga yang terjangkau. "Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran," tegasnya.

Amran memastikan kebijakan ini akan berdampak langsung pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

"Karena yang pasti adalah NTP (Nilai Tukar Petani) naik,

kesejahteraan petani naik, biaya produksi turun, otomatis produksi akan naik tahun-tahun berikutnya. Presiden selalu perintahkan, hilangkan koruptor, mafia hilangkan. Dan tolong support petani seluruh Indonesia, beri yang terbaik. Tolong perhatikan nasib mereka," ujar Amran.

Di satu sisi, Amran juga mengatakan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% tidak akan menimbulkan kerugian bagi PT Pupuk Indonesia. Sebaliknya, BUMN tersebut justru diperkirakan mencatat tambahan keuntungan hingga Rp2,5 triliun tahun depan.

"Justru PT Pupuk (Indonesia) langsung untung. Tahun depan, dengan harga pupuk turun, justru Pupuk Indonesia tambah untung Rp2,5 triliun. Ini ada Dirutnya. Jadi sudah bertambah keuntungan, volume bertambah, efisien, harga turun. Cantik nggak? Itulah revitalisasi," ujar Amran.

Untuk menjalankan perintah itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah cepat dengan merevitalisasi sistem industri dan distribusi pupuk nasional. "Kami langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret: merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN," ujar Amran.

Bahkan, pemerintah kini berencana membangun tujuh pabrik pupuk baru dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun mendatang dengan total investasi mencapai Rp50 triliun. Langkah besar ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri pupuk nasional sekaligus meningkatkan efisiensi produksi.

Amran mengatakan pembangunan pabrik baru tersebut merupakan bagian dari strategi revitalisasi besar-besaran sektor pupuk nasional yang menghasilkan efisiensi besar bagi negara.

Menurut Amran, dengan pembenahan sistem, pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun, menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen, serta meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga Rp2,5 triliun pada tahun 2026, dengan proyeksi total keuntungan mencapai Rp7,5 triliun.

"Revitalisasi ini juga berpotensi menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton secara bertahap hingga 2029," kata Amran.

Lebih jauh, Amran memaparkan, pabrik pupuk lama yang masih mengandalkan bahan baku gas memiliki efisiensi sekitar 43%. Namun, teknologi baru yang akan diterapkan di pabrik modern hanya

membutuhkan 22%-23% bahan baku gas, atau hampir setengah dari konsumsi pabrik konvensional saat ini.

Menurutnya, Indonesia kini memiliki sekitar 12-13 pabrik pupuk yang masih beroperasi. Selain membangun yang baru, pemerintah juga berencana merevitalisasi pabrik tua agar tetap produktif dan efisien.

Ia menambahkan, Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) saat ini tengah mempercepat implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto, melalui pembenahan menyeluruh tata kelola pupuk bersubsidi. Langkah itu mencakup deregulasi sistem distribusi dari pabrik langsung ke petani, penyederhanaan penyaluran, hingga pengawasan ketat dari hulu ke hilir.

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi. Langkah ini dinilai sebagai keputusan bersejarah yang menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap petani sekaligus memperkuat upaya menuju swasembada pangan berkelanjutan.

Pupuk Indonesia menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap keterjangkauan pupuk dan daya beli petani. Dengan harga yang lebih rendah, petani diharapkan semakin mudah memperoleh pupuk untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian di berbagai daerah.

"Pupuk Indonesia mengapresiasi dan mendukung penuh langkah bersejarah pemerintah dalam menurunkan HET pupuk subsidi sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap petani. Sejalan dengan pemerintah, kami berkomitmen memprioritaskan kepentingan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional," ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, di Jakarta, dilansir republika Rabu (22/10/2025).

Per 22 Oktober 2025, stok pupuk subsidi nasional tercatat mencapai 1.101.807 ton, jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Perseroan juga memastikan seluruh proses distribusi berjalan normal dan terkendali di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami memastikan pasokan dan distribusi pupuk tetap aman agar kebijakan ini memberikan manfaat nyata bagi petani di seluruh Indonesia," kata Rahmad.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan kebijakan, Pupuk Indonesia menerapkan pengawasan distribusi berbasis digital melalui sistem i-Pubers dan Command Center. Kedua sistem ini memungkinkan pemantauan stok, penyaluran, dan

transaksi pennebusan secara real-time diseluruh Indonesia.

Dampak ke Petani

Sementara itu, Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Abdul Kadir Karding, menyambut baik penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang baru saja diumumkan pemerintah. Penurunan harga pupuk ini adalah dampak manis dari hasil efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.

"Efisiensi anggaran yang sejak awal gencar dilakukan Presiden Prabowo Subianto, kini bisa dirasakan langsung oleh petani," ujar Sekjen HKTI Abdul Kadir Karding, Rabu (22/10/2025).

Langkah menurunkan harga pupuk ini menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau maka akan meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Pasti seluruh petani akan senang dengan keputusan ini. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah mau mendengar dan mencari solusi dari jeritan para petani selama ini," jelas Karding.

Ungkapan senada juga disampaikan pengamat pertanian, Khudori. Ia menyebut bahwa penurunan pupuk subsidi ini bisa punya dampak langsung kepada petani, terkhusus bagi mereka yang memiliki jatah subsidi.

"Penurunan harga pupuk subsidi tentu membantu petani yang dapat subsidi. Ongkos produksi jadi lebih rendah sedikit. Bagi mereka yang tidak dapat jatah pupuk subsidi tentu harganya tetap harga komersial. Tak ada pengaruh buat mereka," kata Khudori dilansir Bloomberg Technoz, Rabu (22/10/2025).

Namun demikian, Khudori menilai dampak yang diperoleh petani tidaklah terlalu besar, lantaran pupuk hanya punya kontribusi kecil terhadap beban usaha petani. "Buat yang terima subsidi pun penurunan ongkos produksi tidak terlalu besar. Dalam usaha tani baik padi, jagung dan kedelai ongkos pupuk tak sampai 10% dari total ongkos produksi," tambahnya.

"Lagi pula, mereka yang dapat pupuk subsidi hampir pasti tetap beli pupuk nonsubsidi karena jatah pupuk subsidi gak cukup untuk menutup keseluruhan pupuk," sambungnya.

Khudori juga menilai bahwa penurunan pupuk subsidi ini tak serta merta menurunkan harga beras, terlebih untuk beras premium dan medium, terlebih dengan adanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP). (han,ist/lut)

“**S**aya juga baru tahu. Saya enggak pernah menyangka di Pulau Lombok, 1 jam dari Mandalika, ada tambang emas besar,” kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V, Dian Patria, Selasa (21/10/2025).

Dian menjelaskan, KPK menemukan tambang emas di kecamatan Sekotong yang berjarak satu jam perjalanan dari Sirkuit Mandalika, LOMBONG Tengah, NTB karena mereka mendapatkan laporan sejak Agustus 2024.

Mereka mendapatkan laporan bahwa terjadi pembakaran tempat perkemahan (basecamp) tambang emas yang diisi orang-orang dari negara China. Pada 4 Oktober 2024, tim KPK pergi ke Sekotong, LOMBONG Barat, Nusa Tenggara Barat.

“Wartawan tanya saya di NTB, ‘Itu sikap KPK bagaimana?’ Saya juga baru tahu. Saya enggak pernah menyangka di Pulau Lombok, satu jam dari Mandalika, ada tambang emas besar. Baru tahu saya,” kata Dian.

Dian pun menyebut, hasil tambang emas itu luar biasa karena bisa 3 kilogram dalam 1 hari. KPK, kata Dian, mendorong pemerintah terkait untuk menindak tambang ilegal tersebut. “Kami dorong yang punya kewenangan untuk tegakkan aturan,” ujar Dian.

Menurut Dian, bila pemerintah dengan tugas dan fungsi terkait tidak menindak tambang ilegal tersebut, maka KPK akan menegakkannya.

“Kalau dia tidak tegakkan, ya kami tegakkan. Bisa jadi dia bagian dari masalah. Sengaja. Itu yang selama ini banyak terjadi,” katanya dilansir cnnindonesia.

KPK menyebut keberadaan tambang emas di Sekotong tersebut bersifat ilegal, sama seperti tambang emas lainnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Bahkan, Dian mengatakan tambang yang tidak jauh dari Sirkuit Mandalika itu berpotensi mengandung tindak pidana tertentu.

“Kami tidak hanya bicara langsung apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Bisa jadi ada tindak pidana sektoral, apakah kehutanan, lingkungan, pajak,” katanya.

Tindak pidana sektoral yang dia maksud adalah pelanggaran hukum yang spesifik terjadi dalam sektor tertentu. “Kita dorong yang punya kewenangan, tegakkan aturan. Kalau dia tidak tegakkan, ya tidak tegakkan, bisa jadi dia bagian dari masalah. Sengaja,” kata Dian Patria.

Dia merasa aparat setempat tidak berani menindak tambang itu, berlokasi di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

“Mereka tidak berani menagih karena itu mungkin ada backing-backing-nya, atau mereka memang menikmati,” ujarnya.

Masih di lingkup wilayah Provinsi NTB, dia menyebut Pulau Sumbawa

KPK UNGKAP TAMBANG ILEGAL DEKAT MANDALIKA: BISA 3 KG EMAS TIAP HARI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada tambang emas ilegal dekat Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bahkan, dalam sehari tambang itu bisa menghasilkan hingga 3 kilogram emas. Temuan tersebut sempat membuat kaget KPK.



Lokasi tambang emas ilegal di Bukit Malaikat, Lombok NTB.

juga punya tambang ilegal yang lebih besar daripada di Sekotong Lombok Barat. “Di Sumbawa juga ada. Di Lantung namanya ya. Itu lebih besar lagi lokasi tambang ilegalnya,” ujarnya.

Dua Bukit Lokasi Tambang Emas di Sekotong

Tambang emas ilegal yang disampaikan KPK ada di dua bukit yaitu Bukit Montor dan Bukit Malaikat yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Di awal kejayaan tambang emas Sekotong, pada 2008-2010, sekali angkut material dari Bukit Montor bisa menghasilkan puluhan juta rupiah.

Dilansir dari Mongabay, Penamaan bukit itu tak lepas dari sejarah bukit itu yang memberikan kekayaan bagi para penambang. Kekayaan diukur dari jumlah montor (motor dan mobil) yang dimiliki.

Bermula pada 1986-2004, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) meneliti Sekotong. Dari hasil penelitian itu ditemukan kandungan emas. Potensi emas rendah, hingga NNT tidak lanjut. Kemudian dilanjutkan PT Indontan. Perusahaan ini sempat membangun basecamp. Indotan penelitian hingga 2006.

Pada tahun itu, disahkan Perda Nomor 11/2006 tentang RTRW NTB. Dalam perda disebutkan kalau Pulau Lombok bukan daerah tambang logam. Masyarakat Sekotong, sudah terlanjur tahu ada kandungan emas.

Kemudian, mereka mencoba menggali di sekitar basecamp PT, termasuk di daerah-daerah yang pernah kena survei tim perusahaan.

Penambangan emas skala kecil atau tambang rakyat ini mulai marak pada 2008. Saat itulah, banyak penambang lebih berpengalaman datang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada awal-awal tambang ilegal itu, Sekotong yang dulu dikenal sebagai daerah banyak blank spot, sulit akses, berubah jadi kota baru.

Ribuan orang datang dari berbagai daerah. Pemerintah daerah bersama aparat TNI-Polri sampai menghadang orang-orang dari luar daerah yang datang ke Sekotong.

Para penambang dari Jawa Barat, membagi ilmu mereka ke penambang lokal. Selain mengajarkan teknik untuk membangun lubang, mereka lebih banyak dipakai di pengolahan. Mulai dari merancang mesin gelondongan, pencampuran merkuri, pengolahan. Para penambang dari luar ini juga diduga membuka jalur perdagangan merkuri.

Cerita sukses penambang emas di Sekotong terdengar di seantero Lombok. Hanya berdasarkan cerita dari satu penambang ke penambang lain, warga di beberapa daerah mencoba peruntungan.

Mereka juga menggali bukit-bukit. Lokasi penambangan yang pernah dilakukan adalah di Batu Jangkik dan Montong Sapah (Lombok Tengah)

yang berbatasan dengan Sekotong (Lombok Barat). Penambangan lain di Gunung Prabu (Lombok Tengah), bukit-bukit di Batunampar (Lombok Timur). (han,ist/lut)



Wartawan tanya saya di NTB, ‘Itu sikap KPK bagaimana?’ Saya juga baru tahu. Saya enggak pernah menyangka di Pulau Lombok, satu jam dari Mandalika, ada tambang emas besar. Baru tahu saya,”

DIAN PATRIA

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V